

**THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEM, FINANCIAL REPORT ACCESSIBILITY, INTERNAL CONTROL IMPLEMENTATION AND GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION TO REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT ACCOUNTABILITY
(Empirical Study on All OPD of Siak Regency)**

Dea Priscilla¹, Taufeni Taufik², Al Azhar A³

^{1,2,3} Universitas Riau

Email: deaprisilla_1998@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to examine and to analyse the effect of implementation of financial accounting system, financial report accessibility, implementation of internal control and good governance implementation to regional financial management accountability. This research was conducted at all OPD of Siak Regency. This research is a quantitative research. The population of this research is 28 OPD of Siak Regency and the number of samples is 84 respondents. The sampling method that used in this research is purposive sampling. The hypothesis were examined with multiple regression analysis and the statistical program used was SPSS 22. The results showed that the implementation of financial accounting system, financial report accessibility, implementation of internal control and good governance implementation had significant effect on regional financial management accountability.

Keywords: *Implementation of Financial Accounting System; Financial Report Accessibility; Implementation of Internal Control; Good Governance Implementation; Regional Financial Management Accountability.*

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, PENERAPAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh dari penerapan sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal dan penerapan good governance terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan pada seluruh OPD di Kabupaten Siak. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 28 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Siak. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 84 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Hipotesis diuji dengan metode analisis regresi berganda dan program statistik yang digunakan adalah SPSS 22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal dan penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan; Aksesibilitas Laporan Keuangan; Penerapan Pengendalian Internal; Penerapan Good Governance; Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan (Septa, 2018). Laporan keuangan sektor publik adalah sebuah informasi mengenai catatan keuangan sebuah organisasi dalam satu periode. Sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik harus mampu memberikan pertanggung-jawaban publik melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik (Hehanussa, 2015). Semakin baik laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Agar akuntabilitas sektor publik dapat dilaksanakan diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparansi, adil, efektif, efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tepat untuk dapat di implementasikan di daerah menghasilkan suatu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Agar akuntabilitas publik terjamin, diperlukan sistem akuntansi yang baik, transparan, adil, efektif dan efisien (Surjono dan Firdaus, 2017).

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan, akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability (Iskandar, 2014). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah (Fauziah dan Handayani, 2017). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan penerapan pengendalian internal yang tepat. Hal ini karena dalam pengendalian internal, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan (Sari, 2017). Pengendalian internal merupakan salah satu fondasi terkuat good governance.

Terdapat realisasi belanja jasa internet pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp42.866.881,43 atas layanan jasa internet yang tidak dapat dimanfaatkan dan pajak belum dipungut sebesar Rp66.545.454,55. Belanja tanah timbun untuk Landfill TPA pada dinas lingkungan hidup tidak sesuai ketentuan dan terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya sebesar Rp61.534.718,18. Paket pekerjaan pembangunan kantor lurah kandis kota pada sekretariat daerah tidak selesai dikerjakan dan terdapat kekurangan volume sebesar Rp72.091.418,55. Kekurangan volume atas 23 paket pekerjaan belanja modal pada tujuh OPD sebesar Rp1.168.205.485,17. Menginstruksikan bendahara pengeluaran untuk menagih pajak yang belum dipungut sebesar Rp66.545.454,55 kepada PT SPS dan menyetorkan ke kas negara.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp557.445.862,21 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp242.396.883,96 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Kepala Dinas Kesehatan supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp282.933.760,16 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Kepala Badan Keuangan Daerah supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp38.490.446,75 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Siak agar: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian supaya memproses penyelesaian kelebihan pembayaran sebesar Rp19.596.848,91 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke kas daerah. Realisasi Pemakaian BBM Pada 21 OPD Melebihi Standar Sebesar Rp384.693.138,71, Realisasi BBM pada Satpol PP Tidak Senyatanya Sebesar Rp63.888.000,00 dan Pembayaran Belanja BBM Tidak Sesuai Peruntukannya Sebesar Rp562.320.700,00. Kelebihan Pembayaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Sebesar Rp415.140.000,00 dan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Sebesar Rp285.600.000,00. AR sebesar Rp6.375.000,00 dan S sebesar Rp15.660.000,00 dan menyetorkannya ke kas daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Siak agar: memerintahkan Inspektur Daerah Kabupaten Siak untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja sewa kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tahun 2017 sebesar Rp2.685.690.000,00 dan laporannya disampaikan ke BPK. Kepala Satpol PP untuk menyetorkan kelebihan pembelian BBM yang tidak sesuai dengan harga

senyatanya sebesar Rp63.888.000,00 ke kas daerah. Potensi PAD atas pajak restoran kurang diterima sebesar Rp1.559.341.658,45, kelebihan pembayaran tunjangan pegawai yang menjalani tugas belajar sebesar Rp86.166.000,00, kelebihan pembayaran belanja BBM pada sekretariat DPRD sebesar Rp85.040.240,08, memerintahkan kepala dinas kesehatan, direktur RSUD Siak, kepala dinas pendidikan, dan kepala Bappeda terkait untuk menagihkan kelebihan pembayaran tunjangan sebesar Rp86.166.000,00 kepada para pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan menyetorkan ke kas daerah.

Dari kasus diatas sangat berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan Keuangan suatu daerah, dimana Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung- jawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian, dan akan melakukan pengujian dengan mengangkat judul penelitian yaitu : “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada OPD yang ada di Kabupaten Siak)”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal, dan penerapan *good governance* mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada organisasi pemerintah daerah (OPD) di Kabupaten Siak. Penelitian ini pengembangan dari Melisa Nitasari (2018). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah lokasi penelitian, Waktu penelitian dan peneliti menambahkan satu variabel bebas yaitu Penerapan *Good Governance*. Alasan peneliti memilih variabel Penerapan *Good Governance* karena hasil penelitian terdahulu masih tidak konsisten.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agency

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih memerintah orang lain untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Akuntabilitas publik dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2006:20). Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan. Pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya (Faristina, 2011).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung-jawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (Tania, 2009). Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut pasal 232 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggung-jawabkan pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal dan standar akuntansi pemerintah (Halim 2013:84).

Akuntabilitas terbentuk dalam sebuah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang maka perlu untuk melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, menunjang pemerintah daerah dalam menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah maka harus perlu dikembangkan dan disusun penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang tepat (Keputusan Menteri Keuangan No 355/KMK07/2001). Hasil penelitian Asfiryati (2017), Lily (2015), Ria Herlina (2021) dan Kurnia (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H1 : Penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan *Good Governance* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak) (Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A)

Aksesibilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan pertanggung-jawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet dalam Mulyana, 2006).

Pemerintah daerah harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan. Apa artinya menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik.

Akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung-jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mahsun, 2006). Untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat secara terbuka dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Berarti dengan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan bagi para pengguna akan menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Hasil dari penelitian Wahyuni, (2014), Anies Iqbal Mustofa (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap upaya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan Pengendalian Internal

Akuntabilitas dapat terwujud apabila setiap instansi menerapkan penerapan pengendalian internal yang tepat. Hal ini karena dalam penerapan pengendalian internal, suatu instansi diharuskan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang dijelaskan di dalam teori keagenan, bahwa pemerintah sebagai pihak agent bertanggung jawab kepada rakyat sebagai pihak principal. Sehingga, pemerintah dituntut untuk dapat menjalankan akuntabilitas dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawabannya kepada rakyat.

Hasil dari penelitian Nugraha, Susanti (2010), dan Febri Yulisa (2019) menyatakan penerapan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

H3 : Penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Penerapan Good Governance

Good governance dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain (state, private sector and society) (Osborne dan Gaebler, 1992; Lundqvist, 2001).

Good Governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dari segi pandang UNDP, *governance* dikatakan baik (good) apabila sumber daya publik dan masalah-masalah publik dikelola secara efektif dan efisien, yang merupakan respon dari kebutuhan masyarakat. Sementara World Bank memberikan pengertian tentang *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

Berdasar beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik berupa sistem yang mengatur dan mengontrol urusan Negara pada semua tingkat, terkait dengan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berada di dalamnya.

Inti pembahasan dari *good governance* terletak pada pemahaman atas prinsip-prinsip *good governance* itu sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab bisa berjalan apabila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi, memiliki interaksi yang setara. Interaksi dapat terjadi ketika prinsip-prinsip telah diterapkan dan dipahami dengan baik.

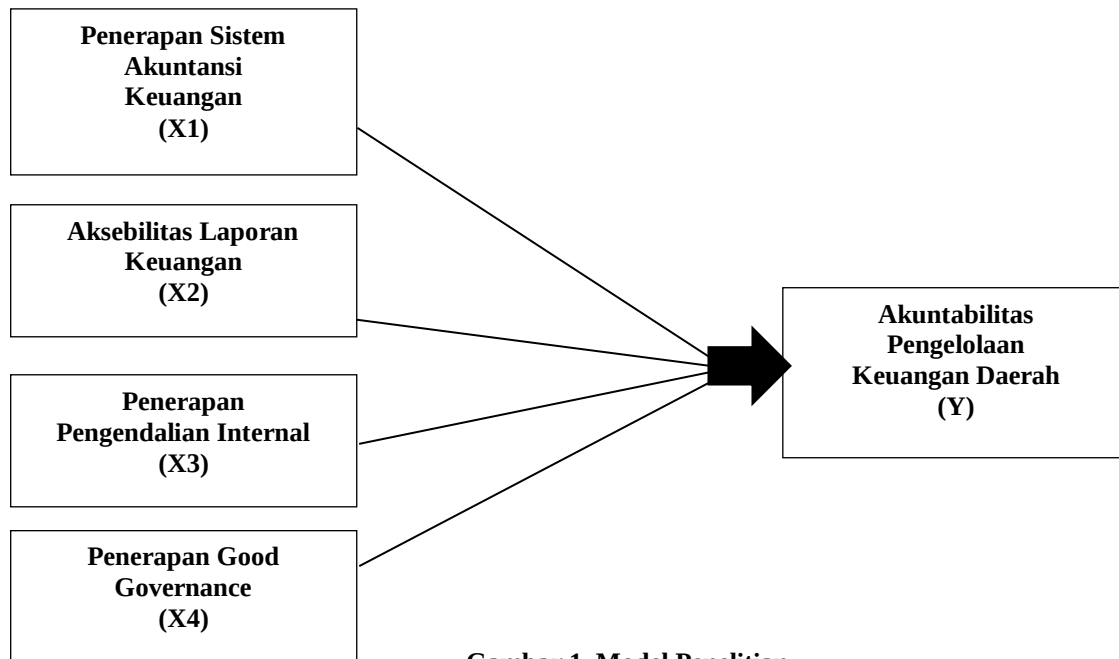
Hasil dari penelitian Rinaldi (2016) dan Taufeni Taufik (2021) menyatakan penerapan *good governance* mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

H4 : Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Model Penelitian

Variabel Independen

Variabel Dependen

**Gambar 1. Model Penelitian****METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Siak. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari tahun 2020 sampai dengan selesai. Peneliti akan meneliti dan menganalisis Pengaruh Penerapan sisitem akuntansi keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penyajian Laporan Keuangan, Penerapan pengendalian internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Sugiyono (2014:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Siak yang berjumlah 28 OPD. Sampel penelitian adalah jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono:2014:81). Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, Purposive sampling merupakan pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2014:122). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dalam bentuk kusioner yang diberikan responden yang dituju. menurut Sugiyono, (2014:230). Jumlah responden yang berhasil di dapatkan sebanak 84 responden dari 28 organisasi pemerintah daerah kabupaten siak. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, dimana data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli yang didasarkan hasil kuesioner yang disebarakan oleh peneliti. Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang berupa daftar pernyataan secara terstuktur, dimana setiap responden dibatasi dalam memberikan jawaban pada beberapa alternatif jawaban tertentu. Sumber data penelitian ini adalah skor total yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dikirim kepada pegawai – pegawai yang bekerja di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Siak.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas**

Berdasarkan hasil penelitian validitas secara statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel penerapan sisitem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal, penerapan *good governance* dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai r hitung $>$ r tabel dapat disimpulkan valid dan layak dijadikan sebagai data penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian reliabilitas statistik masing-masing indikator pertanyaan untuk variabel penerapan sisitem akuntansi keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal, penerapan *good governance* dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bahwa koefisien cronbach alpha $>0,6$ sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrument penelitian adalah reliabel.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak) (Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A)

Tabel 1. Hasil Normalitas

		Unstd. Residual
N		84
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Dev.	2.02773405
Most Extreme Differences	Absolute	.098
	Positive	.098
	Negative	-.058
Kolmogorov-Smirnov Z		.897
Asymp. Sig. (2-tailed)		.397
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel hasil uji kolmogrov-smirnov di atas, dapat diketahui bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed) adalah sebesar 0,397 lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa nilai residual terdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, maka hasil penelitian ini dinyatakan dapat diterima karena data yang dianalisis telah memenuhi kriteria uji normalitas.

Hasil Heteroskedastisitas

hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan scatterplot dari variable dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan titik-titik menyebar diatas dan dibawah pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah terbebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 2. Hasil Multikoloniaritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
(Constant)			
1	Penerapan sisitem akuntansi keuangan Daerah	0,571	1,752
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,947	1,056
	Penerapan Pengendalian Internal	0,946	1,057
	Penerapan Good Governance	0,542	1,844

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, maka dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat nilai VIF dari penerapan sistem akuntansi daerah 1.752, aksesibilitas laporan keuangan 1.056, penerapan pengendalian internal 1.057, dan penerapan good governance 1.844 < 10, sedangkan nilai tolerance dari penerapan sistem akuntansi daerah 0.571, aksesibilitas laporan keuangan 0.947, penerapan pengendalian internal 0.946, dan penerapan good governance 0.542 > 0,1. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a			T	Sig.
Model		Unstdzd. Coeff.		Stdzd. Coeff.		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.023	3.365		1.790	0.077
	Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah	0.447	0.088	0.479	5.070	0.000
	Aksesibilitas Laporan Keuangan	0.297	0.118	0.186	2.530	0.013
	Penerapan Pengendalian Internal	0.170	0.061	0.203	2.761	0.007
	Penerapan Good Governance	0.123	0.049	0.245	2.530	0.013

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 6.023 + 0.447 X_1 + 0.297 X_2 + 0.170 X_3 + 0.123 X_4 + e$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: (1).Nilai konstanta = 6.023 menunjukkan bahwa jika variabel (X) bernilai 0 (nol) maka (Y) bernilai sebesar 6.023. (2). Nilai koefisien regresi variabel (X1) adalah 0.447 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X1) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.447. (3). Nilai koefisien regresi variabel (X2) adalah 0.297 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X2) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.297. (4).Nilai koefisien regresi variabel (X3) adalah 0.170 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X3) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.170. (5) .Nilai koefisien regresi variabel (X4) adalah 0.123 dan bertanda positif. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel (X4) dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan variabel (Y) sebesar 0.123.

Hasil Uji Hipotesis

Untuk melakukan pengujian terhadap masing-masing hipotesis, maka akan digunakan uji regresi parsial (uji t) yang bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis pertama dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Uji Hipotesis Pertama

Variabel	Beta (B)	t hitung	Signifikansi	Hasil
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan	0,447	5,070	0,000	Diterima

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan (X1) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,447 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan memiliki nilai t -hitung sebesar $5,070 > t_{tabel} 1,99045$. Dengan demikian, berdasarkan kriteria H1 diterima dan menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil ini menunjukkan bahwa dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah menjadi bagian penting untuk dipahami pada organisasi sektor pemerintah. Sehingga penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku dapat menjadi salah satu bagian penilaian dalam mengukur akuntabilitas instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Hak dan kewajiban daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, terutama kepada masyarakat setiap OPD wajib melakukan pengelolaan secara akuntabilitas. Tentunya dalam setiap tahap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari akuntabilitas perencanaan, akuntabilitas pelaksanaan, akuntabilitas penatausahaan, akuntabilitas pelaporan, akuntabilitas pertanggungjawaban, serta akuntabilitas pengawasan harus dapat sesuai dengan standar sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga semakin baik setiap OPD menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah ini maka akan semakin baik tahapan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan hasil pengaruh yang positif pada penelitian ini mendukung pernyataan dari Superdi (2017) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Asfiryati (2017), Lily (2015) dan Kurnia (2013) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Saputra (2014) yang menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Tabel 5. Uji Hipotesis Kedua

Variabel	Beta (B)	t hitung	Signifikansi	Hasil
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,297	2,530	0,013	Diterima

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan (X2) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,297 dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ dan memiliki nilai t-hitung sebesar $2,530 > t_{tabel} 1,99045$. Dengan demikian, berdasarkan kriteria H2 diterima dan menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa sulit atau mudahnya pemberian akses kepada para pengguna laporan keuangan daerah menjadi bagian penting untuk dipahami pada organisasi sektor pemerintah. Ini dikarenakan apabila menyajikan laporan keuangan dengan baik tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, maka akan menciptakan suatu kebiasaan buruk pada laporan keuangan yang dihasilkan. Tentunya akan mengganggu terciptanya akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan yang dihasilkan setiap daerah. Jika itu terjadi, kepercayaan dari sipengguna laporan terutama masyarakat akan menurun dan akan membuat OPD terlihat tidak bertanggung jawab pada tugas yang diberikan.

Berpengaruhnya aksesibilitas laporan keuangan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini sejalan pada pernyataan yang disampaikan Wahyuni (2014) bahwasannya dalam Aksesibilitas terdapat beberapa indikator untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, diantaranya keterbukaan, kemudahan, dan accessible. Ketiga hal tersebut menjadi unsur penting yang harus diterapkan organisasi sektor publik dalam melaksanakan tanggung jawabannya.

Sulitnya pemberian akses di OPD akan menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan laporan yang dihasilkan tidak akan berjalan dengan baik. Pemerintah daerah harus mampu memberikan kemudahan akses bagi para pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislatif dan badan pengawasan tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dana publik. Selain itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian dahulu yang pernah dilakukan oleh Superdi (2017) dan Lily (2015) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Melisha Nitasari (2018) yang menemukan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 6. Uji Hipotesis Ketiga

Variabel	Beta (B)	t hitung	Signifikansi	Hasil
Penerapan Pengendalian Internal	0,170	2,761	0,007	Diterima

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan pengendalian internal (X3) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,170 dengan nilai signifikansi $0,007 < 0,05$ dan memiliki nilai t-hitung sebesar $2,761 > t_{tabel} 1,99045$. Dengan demikian, berdasarkan kriteria H3 diterima dan menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pengendalian internal yang baik yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga penerapan pengendalian internal dapat menjadi suatu bentuk pengawasan internal pemerintah pada setiap daerah. Oleh karena itu, penerapan pengendalian internal juga menjadi bagian penting untuk dapat diterapkan dengan baik pada organisasi sektor pemerintah. Sehingga semakin baiknya pengendalian internal yang ada dalam suatu organisasi maka akan membantu mempermudah tercapainya akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

Tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada bentuk pengendalian yang dilakukan pihak instansi pemerintah. Pengelolaan yang baik tentu akan berdampak pada akuntabilitasnya pengelolaan keuangan daerah. Apalagi bagi setiap daerah dalam konteks organisasi pemerintah, wajib memberikan akuntabilitas publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Sehingga dibutuhkan pengendalian internal pada setiap proses yang dilakukan. Karena pengendalian internal ini melekat dalam kegiatan operasional sebuah organisasi, dan merupakan bagian yang integral dari aktivitas dasar manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan organisasi.

Pengendalian internal yang baik akan menjadi suatu bentuk upaya setiap daerah dalam memberikan hasil yang baik dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berkenaan dengan pengelolaan

keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut. Sehingga penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Sari, Mulyani dan Budiarto (2020) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Melisha Nitasari (2018) yang menemukan bahwa penerapan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 7. Uji Hipotesis Keempat

Variabel	Beta (B)	t hitung	Signifikansi	Hasil
Penerapan <i>Good Governance</i>	0,123	2,530	0,013	Diterima

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan good governance (X4) terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y) memiliki koefisien regresi (β) sebesar 0,123 dengan nilai signifikansi $0,013 < 0,05$ dan memiliki nilai t-hitung sebesar $2,530 > t_{tabel} 1,99045$. Dengan demikian, berdasarkan kriteria H4 diterima dan menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan bentuk good governance yang baik untuk dapat diterapkan oleh setiap daerah kepada masyarakat. karena Good governance merupakan bentuk pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggung jawab (accountable) pada publiknya.

Dengan hasil penelitian pengaruh yang positif, Good governance penting untuk dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan laporan keuangan yang baik, melalui dari penganggarannya, penggunaannya sampai dengan pelaporannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah terhadap dana yang berasal dari masyarakat luas, sehingga akuntabilitas keuangan dapat tercapai. Laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pemerintah akan akuntabel jika memenuhi semua prinsip good governance, dengan pemenuhan dasar-dasar pelaporan keuangan yang merupakan prinsip good governance maka pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah dengan sendirinya akan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan dari masyarakat. Terpenuhinya dasar-dasar pelaporan keuangan tersebut juga dapat mencapai kemakmuran dan kemajuan daerah karena sumberdaya daerah akan dikelola untuk tujuan pelayanan masyarakat. Jadi, pemerintah yang telah menerapkan good governance maka laporan keuangannya lebih akuntabel.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan dapat tercipta jika diiringi dengan penerapan good governance. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mardiasmo (2009) bahwa Good Governance sebagai suatu bentuk penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran kesalahan alokasi atas dana investasi, pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), serta menjalankan disiplin anggaran dan penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Apabila hal-hal tersebut dapat diatasi maka kepercayaan publik akan semakin baik kepada setiap instansi pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rinaldi (2016) yang menemukan bahwa penerapan good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Zeyn (2011) yang menemukan bahwa penerapan good governance tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.773 ^a	0.597	0.576	2.07844
a. Predictors: (Constant), Penerapan Good Governance, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal, Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah				

Sumber: Hasil Data Olahan SPSS (2020)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,576 dan dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal dan penerapan good governance sebesar 57,6% sedangkan sisanya 42,4 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini namun diamati oleh penelitian terdahulu antara lain yaitu, penyajian laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, transparansi publik, aktivitas pengendalian.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan Pengendalian Internal dan Penerapan Good Governance Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Seluruh OPD di Kabupaten Siak) (Dea Priscilla, Taufeni Taufik, Al Azhar A)

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data mengenai analisis secara keseluruhan penelitian ini menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang dipengaruhi penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal dan penerapan good governance. Dari hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan, penerapan pengendalian internal, dan *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1).Metode pengumpulan data dengan menggunakan survei melalui kuesioner sehingga jawaban responden hanya terpaku pada pertanyaan yang ada pada kuesioner saja. (2).Variabel yang diukur menggunakan kuesioner hanya menggambarkan pendapat dari aparat pemerintahan daerah Kabupaten Siak, sehingga hasil ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua aparat pemerintah. (3).Penelitian ini hanya menggunakan variabel independen yang memberikan pengaruh hubungan langsung, sehingga masih dapat melakukan mediasi atau moderasi terhadap variabel lainnya.

Dengan memperhatikan kesimpulan penelitian dan keterbatasan dalam penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran, antara lain : (1).Penggunaan selain metode survey atau kuesioner seperti metode interview dapat digunakan untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan subjek dan mendapatkan kejujuran jawaban subyek. (2). Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel dan lokasi yang berbeda agar hasil penelitian dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain itu diharapkan juga penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan hasil dan gambaran penelitian yang lebih baik dan dapat digeneralisasi. (3).Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan melakukan mediasi atau moderasi dengan variabel lainnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Faristina Rosalin. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, Studi pada BLU di Kota Semarang. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fauziah, M. R. dan Nur Handayani. 2017. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 6 No. 6.
- Febri Yulisa, Vince Ratnawati, Taufeni Taufik. 2019. *The Factors Affecting Regional Financial Accountability: Organizational Commitment as Moderating Variables (Study on Rokan Hilir District Government OPD)*. *Internasional Journal of Economics, Business and Applications (IJEBA)* Vol 4, No 2. ISSN 2477-1236.
- Halim, Abdul. 2013. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hehanussa, Salomi, J. 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *2nd Conference in Business, Accounting and Management*. Vol. 2 No. 1 pg. 82-90.
- Iskandar, Saputra. 2014. Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan SKPD. *Jurnal Akuntansi*.
- Jensen, M. C. and Meckling, W. H. 1976. *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structur*, *Journal of Financial Economics*, Vol. 76, pp. 305-360.
- Kurnia, Indra. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal akuntansi*.
- Lily, 2015. Pengaruh Penerapan sistem akuntansi keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Mahsun, Mohammad. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA*.
- Mulyana, Budi. 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Vol 2. No. 1.
- Melisha, Nitasari. 2018. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Penerapan sistem akuntansi keuangan Daerah, Dan Penerapan pengendalian internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Skripsi Akuntansi*.
- Mustofa, Anies Iqbal. 2012. *Pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pemalang*. *Accounting Analysis Journal* 1 (1). Universitas Negeri Semarang.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*. Volume 2 (1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.VANDI.

- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Pertama). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugraha, Darya Setya dan Apriyanti Susanti, 2010, *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*, Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, Vol. 2 No. 2
- Osborne, David, and Gaebler, 1992. *Reinventing Government: How the entrepreneurial spirit is Transforming the Public Sector*. New York: Penguinsc Book.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.
- Permendagri, No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi.
- Rinaldi, Rizal Ricky. 2016. Pengaruh Penerapan *Good Governance*, Audit Kinerja, dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir. 2021. Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Sistem Akuntansi Keuangan, Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal IPM2KPE*.
- Septa, P. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (*Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo*).
- Surjono, Welly dan Nova Roslina Firdaus. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 5 (1) hlm. 1357-1368.
- Sari, N. A., B. Artinah, dan Safriansyah. 2017. "Sustainability Report dan Nilai Perusahaan di Bursa Efek Indonesia". Jurnal Spread, Vol. 7, No. 1, hlm.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet. 2004 *Concept Paper2: Transparency and Accountability in Publik Financial Administration*. UNDESA.
- Sugiyono (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Taufeni Taufik, dan Safrizal. 2021. *Factors That Influence the Village Financial Management with Aparature Commitments as Moderating Variables*. *Journal of Xidian University*, ISSN No:1001-2400.
- Wahyuni, Putu Sri,sulindawati dkk 2014. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah kabupaten Bandung. *Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.